

Bulan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun:

2 0 2 4



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Media:	Radar Sampit	Halaman: A3
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Elektronik	Palangka Post	Tabungan

Razak: WTP Bentuk

Transparansi Pengelolaan

Keuangan Daerah



H Abdul Razak
Wakil Ketua I DPRD Kalteng

Kalteng H Abdul Razak, menghadiri acara penyampaian pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bertempat Jakarta Convention Center (JCC) Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat.

H Abdul Razak menyampaikan, rasa syukurnya, Pemprov Kalteng selama ini selalu

PALANGKA RAYA
- Wakil Ketua I DPRD

mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecual-

ian (WTP) dari BPK RI. Hal ini merupakan bentuk komitmen bersama, dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel untuk kesejahteraan warga Kalteng.

Mantan Bupati Kotawaringin Barat ini turut mengapresiasi pihak BPK RI, atas kerja kerasnya dalam melakukan pengawasan, dan membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang

Sambung

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Elektronik	Palangka Post	Tabengan

optimal bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

“Kita patut mengapresiasi BPK RI yang selalu bekerja keras dalam pengawasan, dan membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, sehingga uang rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal, dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat,” kata Razak, Senin (8/6) di Palangka Raya.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan WTP ini tidak hanya berkat usaha dari pihak pemerintah saja, namun juga berkat partisipasi dan peran aktif dari semua pihak, dalam melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

“Pengelolaan keuangan daerah, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tanpa partisipasi aktif dari semua pihak, dalam melakukan pengawasan, dan memberikan masukan pada setiap kebijakan yang diambil,” kata Razak.

Razak menekankan, tidak semua daerah bisa mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI, karena alasan yang berbeda-beda.

“Kita harus mengapresiasi dan menjaga capaian ini dengan cara melakukan pengawasan yang ketat, dan berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan atas peng-

gunaan anggaran di daerah masing-masing,” ujar Razak.

Mempertahankan WTP Ke-10 kalinya, seluruh masyarakat Kalteng untuk lebih peduli, dan menjaga aset-aset di wilayah Bumi Tambun Bungai. Pasalnya, aset yang ada di Kalteng adalah milik bersama, dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

“Kita harus peduli dan menjaga aset-aset publik yang ada di wilayah kita masing-masing, karena aset tersebut adalah milik bersama, dan harus dijaga dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” tegas Wakil Ketua DPRD Kalteng.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kalteng mengimbau, seluruh pihak untuk turut serta, dalam menjaga keuangan daerah dengan melakukan pengawasan, dan memberikan masukan pada pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan anggaran.

“Kita semua harus peduli dan turut serta dalam menjaga keuangan daerah, dengan melakukan pengawasan dan memberikan masukan pada pihak-pihak terkait, sehingga keuangan daerah dapat digunakan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

jef